

Perencanaan Strategik

(RENSTRA)



KECAMATAN BABAT
TAHUN 2002 - 2003

KATA PENGANTAR

Kita maklumi bersama bahwa dalam era reformasi pemerintah sebagai lembaga publik dituntut untuk akuntabel dalam menjalankan roda pemerintahan sebagaimana amanat Intruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab maka instansi kecamatan perlu menjabarkan Renstra Kabupaten Lamongan tahun 2002-2006.

Perencanaan strategis Kecamatan Babat disusun mencakup uraian visi, misi, strategis dan faktor-faktor kunci keberhasilan Kecamatan Babat, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas ke depan Kecamatan Babat.

Di samping itu Renstra ini juga digunakan untuk mengukur, menilai dan evaluasi kinerja dan sebagai dasar pelaporan akuntabilitas kinerja yang merupakan tolak ukur sistem akuntabilitas kinerja pemerintah.

Kami menyadari karena keterbatasan baik waktu, tenaga maupun pemikiran yang dimiliki oleh tim penyusun Renstra Kecamatan Babat, maka dengan rasa hormat kami menerima kritik, saran, terhadap penyusunan Renstra ini.

Semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua, Amin.



Babat, 2003

CAMAT BABAT

Drs. SUDARTO WAHAB, MM

Penata Tk. I
NIP, 010 075 161

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN

A. Umum	1
B. Kedudukan Maksud, Tujuan.....	2
C. Landasan Penyusunan.....	3

BAB II VISI, MISI, NILAI-NILAI, ANALISA, ASUMSI DAN FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. V i s i.....	5
B. M i s i	5
C. Nilai-Nilai	6
D. Analisa lingkungan internal dan eksternal	8
E. Asumsi-Asumsi	10
F. Hasil Analisis.....	11
G. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan	13

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

1. Tujuan	16
2. Sasaran	17

BAB IV CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

1. Kebijakan bidang ketatausahaan	19
2. Kebijakan Bidang Pemerintahan	25
3. Kebijakan Bidang Ekonomi Pembangunan .	32
4. Kebijakan Bidang	39
5. Kebijakan Bidang Trantib	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun dengan memperhitungkan potensi peluang dan kendala yang ada dan atau mungkin timbul. Rencana strategis mengandung misi, visi dan tujuan / sasaran serta program yang realitas untuk mencapai masa depan yang diinginkan.

Dengan demikian Kecamatan Babat sebagai suatu Lembaga Pemerintahan dituntut untuk menyusun rencana strategis ini sebagai kosekwensi logis dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Penyusunan perencanaan strategis Kecamatan Babat ini dilakukan dengan analisa SWOT yaitu analisis kekuatan (Strength), kelemahan (Weakness), peluang (Opporpunity), ancaman (Threat).

Sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Pemerintah Kecamatan Babat menyusun renstra yang didalam pelaksanaannya perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan tolok ukur kinerja sehingga dapat memudahkan

dalam menilai tugas-tugas Camat yang pada akhirnya dimasukkan dalam pertanggung jawaban Bupati Lamongan.

B. KEDUDUKAN DAN FUNGSI

1. Kedudukan

Kedudukan renstra Kecamatan Babat tahun 2002 s/d 2006 merupakan dokumen perencanaan strategis Kecamatan Babat sebagai tindak lanjut penjabaran Poldas, Propeda dan Renstra Kabupaten Lamongan.

2. Fungsi

Renstra Kecamatan Babat Tahun 2002 s/d 2006 sebagai tolak ukur kinerja Camat dalam mengemban tugas pokok dan fungsi Kecamatan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan renstra ini sebagai penjabaran dari Propeda tahun 2001 s/d 2005 dan renstra Kabupaten Lamongan tahun 2002 s/d 2006.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Renstra Kecamatan Babat tahun 2002 s/d 2006 dimaksudkan sebagai pedoman untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor-faktor kunci keberhasilan dalam menentukan strategi yang tepat untuk

mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan Pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan

2. Tujuan

Perencanaan stretegis bertujuan sebagai langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Instansi Pemerintah dalam sisten Akuntabilitas

D. LANDASAN PENYUSUNAN

Landasan penyusunan RENSTRA Kecamatan Babat

Tahun 2002-2006 adalah :

1. Landasan Ideal : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945
3. Landasan Operasional :
 - a) Ketetapan MPR Nomor : XI/MPR/1998, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme ;
 - b) Ketetapan MPR Nomor : IV/MPR/1999, tentang G B H N ;
 - c) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan Nasional ;
- f) Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 06 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2001-2005
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 07 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 ;

E. SISTEMATIKA

Sistematika dalam penyusunan RENSTRA Kecamatan Babat, sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan yang berisi tinjauan secara umum, kedudukan fungsi maksud dan tujuan, landasan penyusunan, sistematika
- BAB II : Berisi VISI, MISI, Nilai-Nilai Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, Asumsi-asumsi dan Hasil Analisis serta faktor-

faktor keberhasilan yang menjelaskan berbagai faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan.

BAB III : Berisi tujuan, yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan.

BAB IV : Cara mencapai tujuan dan sasaran , yang berisi mengenai kebijaksanaan dan program Pemerintah Kecamatan Babat ;

BAB V : Penerapan Perencanaan Strategis

BAB IV : Penutup

BAB II

VISI, MISI, NILAI-NILAI, ANALISIS, ASUMSI DAN FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

A. VISI

Pengertian Visi ditinjau dari Inpres Nomor 7 Tahun 1999 adalah cara pandang jauh kedepan, kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Babat adalah suatu cita – cita yang menggambarkan Kecamatan Babat di masa depan.

Sehubungan dengan hal tersebut , maka ditetapkan visi Kecamatan Babat sebagai berikut "**TERWUJUDNYA MASYARAKAT BABAT YANG SEJAHTERA, DAMAI, ADIL, BERAKHLAK MULIA DAN MAJU DALAM PERDAGANGANNYA**".

Dari Visi ini dikandung harapan akan memberikan dorongan kepada semua pihak untuk mewujudkan cita-cita.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan pernyataan

misi ini seluruh karyawan dan semua pihak yang berkepentingan dapat mengenal dan mengetahui peran dan program – programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang.

Adapun misi Kecamatan Babat ditetapkan sebagai berikut :

1. Pengembangan sektor perdagangan untuk peningkatan perekonomian masyarakat ;
2. Peningkatan Koordinasi Dinas/Instansi dan Kepala Desa/Kelurahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi ;
3. Perwujudan tertib administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan ;
4. Perwujudan sarana dan prasarana perekonomian yang memadai.
5. Terwujudnya kesejahteraan hidup dan kedamaian
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan bertanggungjawab.

C. NILAI - NILAI

Nilai – nilai merupakan ukuran tentang kebenaran dan kebaikan yang diyakini dan diterapkan dalam kehidupan Individu maupun kehidupan organisasi. Nilai – nilai yang diterapkan sebagai budaya Organisasi Kecamatan Babat adalah :

1. Kesetiaan : Dimaksudkan kesetiaan, ketaatan dan pengabdian kepada Pancasila, Undang - undang Dasar 1945 dan Pemerintah ;
2. Prestasi Kerja : Dimaksudkan adalah hasil kerja yang dicapai dalam melaksanakan tugas yang telah dibebankan ;
3. Tangung jawab : Dimaksudkan kesanggupan dalam menyelesaikan pekerjaan yang diserahkan dengan sebaik - baiknya dan tepat waktu serta berani memikul resiko atas tindakan yang dilakukan ;
4. Ketaatan : Dimaksudkan kesanggupan untuk mentaati segala peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku ;
5. Kejujuran : Dimaksudkan adalah ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan kemampuan untuk tidak menyalah gunakan wewenang ;

6. Kerjasama : Dimaksudkan kemampuan untuk bekerja bersama – sama dengan Orang lain dalam menyelesaikan semua tugas yang ditentukan ;
7. Prakarsa : Adalahn kemampuan dalam mengambil keputusan langkah – langkah atau melaksanakan sesuatu tindakan yang diperlukan.
8. Kepemimpinan : Dimaksudkan kemampuan untuk meyakinkan Orang lain sehingga dapat dikerahkan secara maksimal untuk melaksanakan tugas.

D. ANALISIS LINGKUNGAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

1. Analisis Lingkungan Internal.

Adalah analisis untuk mengetahui kemampuan Internal yang bersifat positif yang memungkinkan Pemerintah Kecamatan Babat memiliki keuntungan statetik dalam mencapai sasaran. Hal ini mempunyai makna sebagai kekuatan (Strenght).

Adapun yang menjadi kekuatan (Streaght) Kecamatan Babat meliputi :

- a. Berlakunya Perda Nomor 29 Tahun 2000, Keputusan Bupati nomor 7 Tahun 2001 dan Keputusan Bupati Nomor 55 Tahun 2001.

- b. Adanya personil yang cukup.
- c. Tersediannya struktur organisasi dan pejabat yang definitif
- d. Sarana dan prasarana yang memadai

Sedangkan situasi dan ketidak mampuan Internal yang mengakibatkan Pemerintah Kecamatan Babat gagal mencapai tujuannya hal ini mempunyai makna kelemahan (Weaknes).

Adapun yang menjadi kelemahan (Weaknes) Kecamatan Babat meliputi :

- a. Kualitas SDM kurang memadai.
- b. Terbatasnya keuangan.
- c. Banyaknya Karyawan yang bertempat tinggal di luar Wilayah Kecamatan Babat.
- d. Rendahnya Disiplin Pegawai.

2. Analisa lingkungan Eksternal.

Faktor Eksternal yang positif akan sangat membantu pemerintahan Kecamatan Babat dalam mencapai dan atau melampaui sasaran yang ditetapkan. Hal ini yang menjadi makna peluang (Opportomties).

Adapun yang menjadi peluang Kecamatan Babat adalah :

- a. Babat merupakan sental perdagangan
- b. Jumlah penduduk yang cukup banyak .

- c. Letak geografis yang strategis
- d. Terbentuknya Dinas / Instansi Tingkat Kecamatan .

Kemudian faktor-faktor Eksternal yang bersifat negatif dapat menyebabkan organisasi gagal dalam mencapai sasaran . Hal ini bermakna ancaman (Threat)

Adapun yang menjadi ancaman (Threat) adalah :

- a. Ekonomi masyarakat rendah
- b. Sering terjadi bencana banjir
- c. Lemahnya koordinasi antara dinas instansi
- d. Sarana perekonomian masyarakat belum memadai.

E. ASUMSI - ASUMSI

1. Lingkungan Internal

No	FAKTOR	Bobot	Ranting	Nilai	Asumsi/ Ranking
A	Kekuatan (Strenght)				
1.	Berlakunya Perda 29 Th 2000, Kep. Bupati No 7 Tahun 2001 dan Kep. Bupati No. 55 Tahun 2001	0,10	2	0,30	3
2.	Jumlah Personil yang cukup	0,15	3	0,45	2
3.	Tersedianya struktur organisasi dan pejabat definitif	0,5	2	0,10	4
4	Sarana dan prasarana yang memadai	0,20	4	0,80	1
B	Kelemahan (Weakness)				
1.	Kualitas SDM kurang	0,20	4	0,80	1
2.	Banyaknya karyawan yang bertempat tinggal diluar daerah	0,5	2	0,10	4
3.	Terbatasnya dana	0,15	4	0,60	2
4.	Rendahnya disiplin karyawan	0,10	2	0,20	3
	Jumlah	100		335	

2. Lingkungan Eksternal

No	FAKTOR	Bobot	Ranting	Nilai	Asumsi/ Ranking
A	Peluang (Opportunity)				
1.	Setra Perdagangan	0,20	4	0,80	1
2.	Junlah penduduk yang cukup besar	0,10	2	0,20	3
3.	Letak yang strategis	0,15	3	0,45	2
4	Terbentuk Dinas/Instansi Tk. Kec.	0,5	2	0,10	4
B	Ancaman (threath)				
1.	Tingkat ekonomi masyarakat yang rendah	0,20	4	0,80	1
2.	Sering terjadi bencana banjir	0,5	2	0,10	4
3.	Lemahnya koordinasi antar Dinas/Instansi	0,15	3	0,45	2
4.	Sarana perekonomian belum memadai	0,10	3	0,30	3
	Jumlah	100			0

F. HASIL ANALISIS

Dengan memperhatikan kekuatan, peluang, kelemahan, dan tantangan yang dihadapi Kecamatan Babat maka dapat disampaikan hasil analisis sebagai berikut :

1. Strategi SO

- Memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babat guna mengkoordinasikan Dinas/Instansi dan Kepala Desa/Kelurahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
- Memberdayakan personil yang ada untuk meningkatkan pelayanan masyarakat

- c. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pengembangan Kecamatan Babat sebagai sentra perdagangan.

2. Strategi WO

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Kantor Kecamatan Babat untuk mendukung optimalisasi pengembangan potensi wilayah Kecamatan Babat.
- b. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Babat untuk mendukung optimalisasi dalam pemberian pelayanan pada masyarakat.
- c. Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan , pembarigunan dan kemasyarakatan.

3. Strategi ST

- a. Optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Babat dalam memantapkan koordinasi antar Dinas/Instansi dan Kepala Desa/Kelurahan guna meningkatkan perekonomian masyarakat.

- b. Meningkatkan kinerja personil Kecamatan Babat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menghadapi kondisi geografis yang rentan terhadap bencana alam.
- c. Mengoptimalkan personil yang ada dalam menginventarisir sarana dan prasarana perekonomian guna meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana perekonomian di Kecamatan Babat.

4. Strategi WT

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Kecamatan Babat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Meningkatkan disiplin karyawan dalam memantapkan koordinasi antar Dinas/Instansi dan Kepala Desa/Kelurahan untuk mengantisipasi bencana alam.
- c. Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

F. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor kunci keberhasilan adalah unsur-unsur dari Kecamatan Babat yang menentukan keberhasilan atau kegagalan strategi, berdasarkan pengembangan informasi yang diperoleh pada analisa Lingkungan Internal/ Analisa lingkungan eksternal sebagaimana tersebut di atas, yang memenuhi kriteria penting dapat diukur dan dikendalikan, tidak terlalu banyak dan dapat ditetapkan.

Dari hasil analisis tersebut di atas, maka ditetapkan yang terpilih sebagai kunci keberhasilan Kecamatan Babat, sebagai berikut :

1. Mempermantap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babat guna mengkoordinasikan Dinas/Instansi dan Kepala Desa/Kelurahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat.
2. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna mengembangkan Kecamatan Babat sebagai sentra perdagangan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pada Kantor Kecamatan Babat untuk mendukung optimalisasi pengembangan potensi wilayah Babat.
4. Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan, guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

5. Meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Babat dalam rangka mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada masyarakat.
6. Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan ini sebagaimana tertuang dalam lampiran VI.

B A B I I I

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi Kecamatan Babat, maka Kecamatan Babat menjabarkan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa pembuatan tujuan dan sasaran organisasi. Penetapan tujuan dan sasaran telah didasarkan pada faktor-faktor kunci-kunci keberhasilan yang telah ditetapkan, hal ini dilaksanakan agar Kecamatan Babat sebagai Perangkat Daerah mampu mencapai tujuan dan sasarnya, sehingga tidak aktivitas yang terbelangkai atau tidak tercapai. Oleh karena itu dengan mengetahui faktor-faktor kunci keberhasilan maka Kecamatan Babat telah memahami kelebihan dan kekurangan.

Adapun tujuan Kecamatan Babat sebagai berikut :

1. Mewujudkan kemampuan personil yang handal melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat .
2. Mewujudkan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana dan prasarana perdagangan serta peningkatan sarana jalan desa ;

3. Mewujudkan ketentraman dan keterliban masyarakat melalui peningkatan koordinasi Dinas /Instansi di Kecamatan Babat ;
4. Mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

B. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran terhadap tujuan, dan merupakan sesuatu yang akan dicapai Kecamatan Babat pada kurun waktu tertentu, dan menggambarkan pula tindakan-tindakan yang akan dilakukan dalam operasionalisasi Kecamatan Babat.

Adapun sasaran dalam rencana strategi sebagai berikut :

1. Terwujudnya peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan secara bertahap ;
2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana perdagangan ;
3. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan masyarakat melalui peningkatan SDM dan sarana prasarana ;
4. Terwujudnya sarana perhubungan yang memadai melalui pembangunan jalan poros desa ;
5. Peningkatan koordinasi Dinas/Instansi melalui peningkatan intensitas rapat koordinasi;
6. Mewujudkan tertib administrasi melalui peningkatan pemahaman tugas pokok dan fungsi ;

BAB IV

CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan faktor terpenting dalam prosès perencanaan strategis dengan menyiapkan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Kecamatan Babat yang meliputi penetapan kebijaksanaan, program operasional, dan kegiatan atau aktifitas dengan memperhatikan sumber daya dan keadaan yang dihadapi :

A. KEBIJAKSANAAN BIDANG KETATAUSAHAAN

Meningkatkan kualitas kelembagaan,
ketatalaksanaan, perencanaan, keuangan dan umum

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2002

1. Penyusunan perencanaan dan administrasi data ;
 - 1) Evaluasi dan pelaporan serta pengkajian perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

- 2) Penataan ketatalaksanaan dan rumah tangga
 - 3) Evaluasi mekanisme surat menyurat
 - 4) Evaluasi mekanisme pelaporan;
2. Penataan dan perencanaan kepegawaian
- 1) Penataan dan pelaporan personil
 - 2) Evaluasi dan peningkatan SDM
3. Perlengkapan dan kehumasan
- 1) Evaluasi dan pelaporan serta pendataan perlengkapan kantor
 - 2) Evaluasi dan pelaporan kehumasan
- Penjabaran kebijaksanaan dan rincian program serta kegiatan termuat dalam PS-1 Lampiran I hal

Tahun 2003

1. Penyusunan perencanaan dan administrasi data ;
- 1) Evaluasi dan pelaporan serta pengkajian perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

- 2) Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas;
2. Penataan ketatalaksanaan dan rumah tangga
 - 1) Evaluasi mekanisme surat menyurat ;
 - 2) Evaluasi mekanisme pelaporan;
3. Penataan dan perencanaan kepegawaian
 - 1) Penataan dan pelaporan personil;
 - 2) Evaluasi dan peningkatan SDM;
 - 3) Mengikutsertakan 3 Personil dalam Diklat Simduk;
 - 4) Mengikutsertakan 1 Personil dalam Diklat Ketatalaksanaan
4. Perlengkapan dan kehumasan
 - 1) Evaluasi dan pelaporan serta pendataan perlengkapan kantor;
 - 2) Rehabilitasi rumah dinas;
 - 3) Pengusulan 2 Perangkat Komputer;
 - 4) Evaluasi dan pelaporan kehumasan;

Penjabaran kebijaksanaan dan rincian program serta kegiatan termuat dalam PS-1 Lampiran I hal

Tahun 2004

1. Penyusunan perencanaan dan administrasi data ;
 - 1) Evaluasi dan pelaporan serta pengkajian perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - 2) Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas;
2. Penataan ketatalaksanaan dan rumah tangga
 - 1) Evaluasi mekanisme surat menyurat ;
 - 2) Evaluasi mekanisme pelaporan;
3. Penataan dan perencanaan kepegawaian
 - 1) Evaluasi, penataan dan pelaporan personil;
 - 2) Evaluasi dan peningkatan SDM;
 - 3) Mengikutsertakan personil dalam Diklat ;
4. Perlengkapan dan kehumasan
 - 1) Evaluasi dan pelaporan serta pendataan perlengkapan kantor;

2) Pengusulan penambahan lokal pada Kantor Kec. Babat

3) Evaluasi dan pelaporan kehumasan

Tahun 2005

1. Penyusunan perencanaan dan administrasi data ;

1) Evaluasi dan pelaporan serta pengkajian perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;

2) Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas;

2. Penataan ketatalaksanaan dan rumah tangga

1) Evaluasi mekanisme surat menyurat ;

2) Evaluasi mekanisme pelaporan;

3. Penataan dan perencanaan kepegawaian

1) Evaluasi, penataan dan pelaporan personil;

2) Evaluasi dan peningkatan SDM;

3) Mengikutsertakan personil dalam Diklat ;

4. Perlengkapan dan kehumasan

1) Evaluasi dan pelaporan serta pendataan perlengkapan kantor;

2) Evaluasi dan pelaporan kehumasan;

Penjabaran kebijaksanaan dan rincian program serta kegiatan termuat dalam PS-1 Lampiran I hal

Tahun 2006

1. Penyusunan perencanaan dan administrasi data ;

- 1) Evaluasi dan pelaporan serta pengkajian perencanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
- 2) Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas;

2. Penataan ketatalaksanaan dan rumah tangga

- 1) Evaluasi mekanisme surat menyurat ;
- 2) Evaluasi mekanisme pelaporan;

3. Penataan dan perencanaan kepegawaian

- 1) Evaluasi, penataan dan pelaporan personil;
- 2) Evaluasi dan peningkatan SDM;
- 3) Mengikutsertakan personil dalam Diklat ;

4. Perlengkapan dan kehumasan

1) Evaluasi dan pelaporan serta pendataan perlengkapan kantor;

2) Evaluasi dan pelaporan kehumasan

Penjabaran kebijaksanaan dan rincian program serta kegiatan termuat dalam PS-1 Lampiran I hal

B. KEBIJAKSANAAN BIDANG PEMERINTAHAN

Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan Desa/Kelurahan dan keagrariaan.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2002

1. Pembinaan dan koordinasi Dinas/Instansi

1) Penyusunan jadwal Rakor Dinas/Instansi

2. Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil

1) Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk;

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan

Desa/Kelurahan

- 1) Mengadakan rapat dinas Kepala Desa, /Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD;
- 2) Pembinaan pembuatan Peraturan Desa ;

4. Pembinaan keagrariaan dan pendapatan daerah

- 1) Inventarisir tanah kas desa (aset desa).;
- 2) Evaluasi dan pelaporan PAD ;

5. Pembinaan perijinan dan pelayanan umum

- 1) Pelayanan pengurusan KTP, KSK, Surat Pindah.

Tahun 2003

1. Pembinaan dan koordinasi Dinas/Instansi

- 1) Penyusunan jadwal Rakor Dinas/Instansi
- 2) Pembinaan, koordinasi , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

2. Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk;
- 2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan

Simduk

- 3) Pendataan, evaluasi dan pelaporan jumlah penduduk dan hak pilih

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan

- 1). Mengadakan pembinaan dan rapat dinas Kepala Desa, /Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD;
- 2). Pembinaan pembuatan Peraturan Desa ;
- 3). Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan APBD
- 4). Evaluasi dan Penelitian usulan laporan Pemerintahan Desa/Kel kepada Bupati.

4. Pembinaan keagrariaan dan pendapatan daerah

- 1). Pembinaan dan Inventarisir tanah kas desa (aset desa).;
- 2). Evaluasi dan pelaporan PAD ;
- 3). Pendataan dan evaluasi tanah aset daerah

5. Pembinaan perijinan dan pelayanan umum

- 1) Pelayanan pengurusan KTP, KSK, Surat Pindah.

6. Pembinaan Politik Dalam Negeri

- 1) Inventarisasi keberadaan Partai Politik ;

Tahun 2004**1. Pembinaan dan koordinasi Dinas/Instansi**

- 1) Penyusunan jadwal Rakor Dinas/Instansi
- 2) Pembinaan, koordinasi , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

2. Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk;
- 2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Simduk

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kelurahan

- 1). Mengadakan pembinaan dan rapat dinas Kepala Desa, /Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD;
- 2). Pembinaan pembuatan Peraturan Desa ;
- 3). Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan APBD
- 4). Evaluasi dan Penelitian usulan laporan Pemerintahan Desa/Kel kepada Bupati.

4. Pembinaan keagrariaan dan pendapatan daerah

- 1). Pembinaan dan Inventarisir tanah kas desa (aset desa).;
- 2). Evaluasi dan pelaporan PAD ;
- 3). Pendataan dan evaluasi tanah aset daerah

5. Pembinaan perijinan dan pelayanan umum

- 1) Pelayanan pengurusan KTP, KSK, Surat Pindah.

6. Pembinaan Politik Dalam Negeri

- 1) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemilu
- 2) Inventarisasi keberadaan Partai Politik ;

Tahun 2005

1. Pembinaan dan koordinasi Dinas/Instansi

- 1) Penyusunan jadwal Rakor Dinas/Instansi
- 2) Pembinaan, koordinasi , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

2. Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk;
- 2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Simduk

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- 1). Mengadakan pembinaan dan rapat dinas Kepala Desa, /Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD;
- 2). Pembinaan pembuatan Peraturan Desa ;
- 3). Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan APBD
- 4). Evaluasi dan Penelitian usulan laporan Pemerintahan Desa/Kel kepada Bupati.

4. Pembinaan keagrariaan dan pendapatan daerah

- 1). Pembinaan dan Inventarisir tanah kas desa (aset desa).;
- 2). Evaluasi dan pelaporan PAD ;
- 3). Pendataan dan evaluasi tanah aset daerah

5. Pembinaan perijinan dan pelayanan umum

- 1) Pelayanan pengurusan KTP, KSK, Surat Pindah.

6. Pembinaan Politik Dalam Negeri

- 1) Inventarisasi keberadaan Partai Politik ;

Tahun 2006

1. Pembinaan dan koordinasi Dinas/Instansi

- 1) Penyusunan jadwal Rakor Dinas/Instansi
- 2) Pembinaan, koordinasi , evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

2. Pembinaan Kependudukan dan Catatan Sipil

- 1) Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk;
- 2) Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan Simduk

3. Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan

- 1). Mengadakan pembinaan dan rapat dinas Kepala Desa, /Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan dan BPD;
- 2). Pembinaan pembuatan Peraturan Desa ;
- 3). Pembinaan dan Pelatihan Penyusunan APBD
- 4). Evaluasi dan Penelitian usulan laporan Pemerintahan Desa/Kel kepada Bupati.

4. Pembinaan keagrariaan dan pendapatan daerah

- 1). Pembinaan dan Inventarisir tanah kas desa (aset desa).;
- 2). Evaluasi dan pelaporan PAD ;
- 3). Pendataan dan evaluasi tanah aset daerah

5. Pembinaan perijinan dan pelayanan umum

- 1) Pelayanan pengurusan KTP, KSK, Surat Pindah.

6. Pembinaan Politik Dalam Negeri

- 1) Inventarisasi keberadaan Partai Politik ;

C. KEBIJAKSANAAN BIDANG EKONOMI PEMBANGUNAN

Peningkatan pengendalian dan koordinasi perekonomian dan pembangunan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2002

1. Peningkatan perekonomian pedesaan

- 1) Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa
- 2) Pembinaan Administrasi pengelola UED-SP
- 3) Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT
- 4) Evaluasi perkembangan pasar desa

2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah

- 1) Pembinaan dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan rumah tangga.

3. Pembinaan sektor Pertanian, peternakan dan perikanan

1. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi , sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan
2. Pembinaan pengembangan usaha tani, panen, pengelolaan hasil dan pemasaran;

4. Pembinaan sektor Pekerjaan umum

- 1) Pengkoordinasian usulan pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk diteruskan Bupati;
- 2) Pengawasan terhadap pelaksanaan, pengelolaan pembangunan fisik sarana dan prasarana

Tahun 2003

1. Peningkatan perekonomian pedesaan

1. Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa

2. Pembinaan Administrasi pengelola UED-SP
 3. Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT
 4. Evaluasi perkembangan pasar desa
2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah
 - 1) Pembinaan dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan rumah tangga.
3. Pembinaan sektor Pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1).Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi , sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan
 - 2).Pembinaan pengembangan usaha tani, panen, pengelolaan hasil dan pemasaran;
4. Pembinaan sektor Pekerjaan umum
 - 1) Pengkoordinasian usulan pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk diteruskan Bupati;
 - 2) Pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan, pengelolaan pembangunan fisik sarana dan prasarana

Tahun 2004

1. Peningkatan perekonomian pedesaan
 1. Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa
 2. Pembinaan Administrasi pengelola UED-SP
 3. Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT
 4. Evaluasi perkembangan pasar desa
2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah
 - 1) Pembinaan dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan rumah tangga.
3. Pembinaan sektor Pertanian, peternakan dan perikanan
 - 1). Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi , sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan
 - 2). Pembinaan pengembangan usaha tani, panen, pengelolaan hasil dan pemasaran;

4. Pembinaan sektor Pekerjaan umum

- 1) Pengkoordinasian usulan pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk diteruskan Bupati;
- 2) Pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan, pengelolaan pembangunan fisik sarana dan prasarana

Tahun 2005

1. Peningkatan perekonomian pedesaan

1. Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa
2. Pembinaan Administrasi pengelola UED-SP
3. Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT
4. Evaluasi perkembangan pasar desa

2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah

- 1). Pembinaan dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan rumah tangga.

3. Pembinaan sektor Pertanian, peternakan dan perikanan

- 1). Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi , sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan
- 2). Pembinaan pengembangan usaha tani, panen, pengelolaan hasil dan pemasaran;
4. Pembinaan sektor Pekerjaan umum
 - 1) Pengkoordinasian usulan pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk diteruskan Bupati;
 - 2) Pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan, pengelolaan pembangunan fisik sarana dan prasarana

Tahun 2006

1. Peningkatan perekonomian pedesaan
 1. Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa
 2. Pembinaan Administrasi pengelola UED-SP
 3. Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT
 4. Evaluasi perkembangan pasar desa

2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah

- 1) Pembinaan dan penyuluhan kepada pengrajin industri kecil dan rumah tangga.

3. Pembinaan sektor Pertanian, peternakan dan perikanan

- 1). Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi , sarana produksi pertanian, peternakan dan perikanan
- 2). Pembinaan pengembangan usaha tani, panen, pengelolaan hasil dan pemasaran;

4. Pembinaan sektor Pekerjaan umum

- 1) Pengkoordinasian usulan pembangunan fisik sarana dan prasarana untuk diteruskan Bupati;
- 2) Pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan, pengelolaan pembangunan fisik sarana dan prasarana

D. KEBIJAKSANAAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL

Peningkatan pengendalian dan koordinasi dalam bidang kesejahteraan sosial dan pembangunan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2002

1. Pembinaan sektor pendidikan oleh raga dan kebudayaan
 - 1) Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan , pengawasan dan usulan program pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
 - 2) Inventarisasi dan pelaporan data pendidikan dan usia sekolah
2. Pembinaan sektor kesehatan
 - 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan usulan program pembangunan bidang kesehatan dan KB;
 - 2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular;

3. Pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial

- 1) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan uang baziz dan sumbangan
- 2) Pengkoordinasian kegiatan operasional baziz.
- 3) Koordiansi program pengentasan kemiskinan dan KB

Tahun 2003

1. Pembinaan sektor pendidikan oleh raga dan kebudayaan

- 1) Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan , pengawasan dan usulan program pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Inventarisasi dan pelaporan data pendidikan dan usia sekolah

2. Pembinaan sektor kesehatan

- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan usulan program pembangunan bidang kesehatan dan KB;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular;

3. Pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial

- 1) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan uang baziz dan sumbangan
- 2) Pengkoordinasian kegiatan operasional baziz.
- 3) Koordiansi program pengentasan kemiskinan dan KB

Tahun 2004

1. Pembinaan sektor pendidikan oleh raga dan kebudayaan

- 1) Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan , pengawasan dan usulan program pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Inventarisasi dan pelaporan data pendidikan dan usia sekolah

2. Pembinaan sektor kesehatan

- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan usulan program pembangunan bidang kesehatan dan KB;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular;

3. Pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial

- 1) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan uang baziz dan sumbangan
- 2) Pengkoordinasian kegiatan operasional baziz.
- 3) Koordiansi program pengentasan kemiskinan dan KB

Tahun 2005

1. Pembinaan sektor pendidikan oleh raga dan kebudayaan

- 1) Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan , pengawasan dan usulan program pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Inventarisasi dan pelaporan data pendidikan dan usia sekolah

2. Pembinaan sektor kesehatan

- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan usulan program pembangunan bidang kesehatan dan KB;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular;

3. Pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial

- 1) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan uang baziz dan sumbangan
- 2) Pengkoordinasian kegiatan operasional baziz.
- 3) Koordiansi program pengentasan kemiskinan dan KB

Tahun 2006

1. Pembinaan sektor pendidikan oleh raga dan kebudayaan

- 1) Pengkoordinasian perencanaan pelaksanaan , pengawasan dan usulan program pengembangan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- 2) Inventarisasi dan pelaporan data pendidikan dan usia sekolah

2. Pembinaan sektor kesehatan

- 1) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan usulan program pembangunan bidang kesehatan dan KB;
- 2) Pelaksanaan koordinasi pengendalian dan pencegahan penyakit menular;

3. Pembinaan dan koordinasi kesejahteraan sosial

- 1) Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan uang baziz dan sumbangan
- 2) Pengkoordinasian kegiatan operasional baziz.
- 3) Koordinasi program pengentasan kemiskinan dan KB

E. KEBIJAKSANAAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Peningkatan pengendalian dan koordinasi dalam bidang ketentraman dan ketertiban.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Tahun 2002

1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban
 - 1) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas
 - 2) Pembinaan terhadap Kasi Tramtib Desa/Kelurahan setiap bulan
 - 3) Evaluasi dan monitoring serta pelaporan situasi tramtibmas

2. Penegakan Perda dan Per undang-undangan

- 1) Evaluasi pelaksanaan IMB dan ijin HO ;

3. Penanggulangan Bencana Alam

- 1) Koordinasi dan antisipasi serta rehabilitasi bencana alam
- 2) Pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat

Tahun 2003

1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban

- 1) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas
- 2) Pembinaan terhadap Kasi Tramtib Desa/Kelurahan setiap bulan
- 3) Evaluasi dan monitoring serta pelaporan situasi tramtibmas

2. Penegakan Perda dan Per undang-undangan

- 1) Evaluasi pelaksanaan IMB dan ijin HO ;

3. Penanggulangan Bencana Alam

- 1) Koordinasi dan antisipasi serta rehabilitasi bencana alam
- 2) Pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat

Tahun 2004

1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban

- 1) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas
- 2) Pembinaan terhadap Kasi Tramtib Desa/Kelurahan setiap bulan
- 3) Evaluasi dan monitoring serta pelaporan situasi tramtibmas

2. Penegakan Perda dan Per undang-undangan

- 1) Evaluasi pelaksanaan IMB dan ijin HO ;

3. Penanggulangan Bencana Alam

- 1) Koordinasi dan antisipasi serta rehabilitasi bencana alam
- 2) Pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat

Tahun 2005

1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban

- 1) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas
- 2) Pembinaan terhadap Kasi Tramtib Desa/Kelurahan setiap bulan
- 3) Evaluasi dan monitoring serta pelaporan situasi tramtibmas

2. Penegakan Perda dan Per undang-undangan

- 1) Evaluasi pelaksanaan IMB dan ijin HO ;

3. Penanggulangan Bencana Alam

- 1) Koordinasi dan antisipasi serta rehabilitasi bencana alam
- 2) Pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat

Tahun 2006

1. Koordinasi ketentraman dan ketertiban

- 1) Kerja sama dengan aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas

2) Pembinaan terhadap Kasi Tramtib Desa/Kelurahan
setiap bulan

3) Evaluasi dan monitoring serta pelaporan situasi
tramtibmas

2. Penegakan Perda dan Per undang-undangan

1) Evaluasi pelaksanaan IMB dan ijin HO ;

3. Penanggulangan Bencana Alam

1) Koordinasi dan antisipasi serta rehabilitasi bencana
alam

2) Pembinaan kesiagaan perlindungan masyarakat

BAB V

PENUTUP

Perencanaan Strategis Kecamatan Babat merupakan dokumen rencana kerja yang berfungsi sebagai penjabaran dari tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babat dan implementasi dari pelimpahan wewenang Kepala Daerah Kepada Camat.

Dengan demikian perencanaan strategis Kecamatan Babat dijadikan pedoman rencana operasional Kecamatan Babat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan yang telah tertuang dalam Renstra Kabupaten Lamongan Tahun 2002-2006.

PERENCANAAN STRATEGIK KECAMATAN BABAT

Tahun : 2002 (PS I)

No	Bidang/Sektor/Sub Sektor	Kebijaksanaan Daerah Strategis	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan / Sasaran		
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Bidang Ketatausahaan	1. Tertib administrasi ketatausahaan 2. Tertib Adm Pem, Pemb, dan Kemas. 3. Pengendalian Ekonomi dan Pemb. 4. Koordinasi Kesejahteraan Sosial 5. Terkendali situasi Tramtib masy.	1. Terwujudnya masyarakat Babat yg sejahtera damai adil berakhlak mulia dan maju dalam perdagangannya	1. Pengembangan sektor perdagangan untuk peningkatan perekonomian masy. 2. Peningkatan koordinasi Dinas/Ist. & Kades/Kel dlm Pelak Tugas&Fungsi 3. Perwujudan tertib Adm. Pemerintahan, Pembangunan & kemasy 4. Perwujudan sarana & Prasarana perekonomian yang memadai 5. Terwujudnya kesejahteraan hidup & kedamaian 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat cepat tepat & bertanggung jawab	1. Mewujudkan kemampuan personil yg handal melalui peningkatan SDM dlm meningkatkan Yan Mas 2. Mewujudkan ekonomi peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana & prasarana perdagangan serta peningkatan sarana jalan Desa 3. Mewujudkan Tramtibmas melalui peningkatan koordinasi Dns/Ist. Kec. Babat 4. Mewujudkan tertib Adm. Pemrt. Pemb & Kemasy.	1. erwujudnya peningkatan SDM melalui Diklat secara bertahap 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masy. melalui penyediaan sarana. Perdagangan. 3. erwujudnya peningkatan Yan Mas melalui peningkatan SDM & Sar. Pras. 4. Terwujudnya srn Perhubungan yg memadai melalui pemb. Jln poros desa 5. Peningkatan koordinasi Dns/Ist. Melalui peningkatan Intensitas rpt koordinasi 6. Mewujudkan tertib adm melalui pemahaman tupoksi	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan ketata laksanaan perencanaan keuangan & umum	1. Penyusunan perencanaan adm data 2. Penataan dan perencanaan kepeg. Perlengkap. & kehumasn	1. Evaluasi & pelaporan serta pengkajian perencanaan Bidang pemerintahan Pemb. & Kemasy 2. Penataan ketatalaksanaan & rumah tangga. 3. Evaluasi mekanisme surat-menyerat. 4. Evaluasi mekanisme pelaporan 1. Penataan dan pelaporan personil 2. Evaluasi dan peningkatan SDM 3. Evaluasi, pelaporan & pendataan perlengkapan Ktr 4. Evaluasi & pelaporan kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Bidang Pemerin- tahan.						1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel.	1. Pembinaan dan ko-ordinasi dinas/Instansi. 2. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan des/ Kel. 4. Pembinaan Keagrarian dan Penda patan daerah 5. Pembinaan Perijinan dan pelayanan umum	1. Penyusunan jadwal rapat dinas/instansi 1. Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk 1. Mendakan rapat dinas Kades/Ka – kel BPD dan Perangkat Desa. 2. Pembinaan pembuatan Perdes. 1. Inventarisasi Tanah Kas Desa 2. Evaluasi dan Pelaporan PAD 1. Pelayanan KTP, KSK dan Mutasi Penduduk

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bidang Ekonomi Pembangunan						1. Pengendalian dan koord ekonomi dan pemb.	1..Peningkatan Perekonomian pedesaan 2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah 3. Pembinaan Sektor pertanian peternakan dan perikanan 4. Pembinaan sektor pekerjaan umum.	1. Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa. 2. Pembinaan adm. Pengelola UED-SP 3. Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT 4. Evaluasi perkembangan Pasar Desa 1. Pembinaan dan penyuluhan kpd pengrajin industri kecil dan menengah. 1. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi sarana produksi. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha tani, panen, dan pemasaran 1. Pengkoordinasian usulan pemb fisik sarana dan prasarana unt. Diteruskan ke Bupati. 2. Pengawasan terhadap pengawasan pengelolaan pemb. Fisik sarana dan prasarana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Bidang Kesejahteraan sosial						1. Peningkatan pengendalian kesejahteraan sosial	1. Pembinaan oleh raga pendidikan dan kebud. 2. Pembinaan sektor kesehatan. 3. Pembinaan dan koordinasi kesos	1. Pengkoordinasian perencanaan. Pelaks. Pengawasan dan usulan program pengemb. Bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Inventarisasi dan Pelaporan data pendidikan dan kebud. 1. Koord. Perenc, pelaks. Dan usulan program pembangunan bid kesehatan dan KB 2. Pelaks. Koord. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular. 1. Pemberian rekomendasi ijin pengumpulan uang Bazis dan sumbangan 2. Pengkoordinasian kegiatan operasional kegiatan bazis. 3. Pengkoordinasian program pengentasan kemiskinan dan KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Bidang Tramtib						1. Peningkat an pengen- dalian dan koord. Bid tramtib.	1. Koord. Tramtib 2.Penegakan Perda dan Per UU 3. Penaggu- langan ben- cana alam	1.Kerjasama dg apa- rat keamanan da- lam menjaga tram tibmas 2. Pembinaan terha- dap kasi tremtib des/kel setiap bulan 3. Evaluasi dan monitoring serta pelaporan stiasi Tramtibmas. 1. Evaluasi pelaks. IMB dan ijin HO 1.Koordinasi, dan antisipasi serta rehabilitasi benca- na alam 2. Pembinaan kesia- gaan perlindungan masyarakat.

Tahun : 2003 (PS2)

No	Bidang/Sektor/Sub Sektor	Kebijaksanaan Daerah Strategis	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan / Sasaran		
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Bidang Ketatausahaan	1. Tertib administrasi tausahaan 2. Tertib Adm Pem, Pemb, dan Kemas. 3. Pengendalian Ekonomi dan Pemb. 4. Koordinasi Kesejahteraan Sosial 5. Terkendali situasi Tramtib masy.	1. Terwujudnya masyarakat Babat yg sejahtera damai adil berakhlak mulia dan maju dalam perdagangannya	1. Pengembangan sektor perdagangan untuk peningkatan perekonomian masy. 2. Peningkatan koordinasi Dinas/Ist. & Kades/Kel dlm Pelak. Tugas & Fungsi 3. Perwujudan tertib Adm. Pemerintahan, Pembangunan & kemasy 4. Perwujudan sarana & Prasarana perekonomian yang memadai 5. Terwujudnya kesejahteraan hidup & kedamaian 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat cepat tepat & bertanggung jawab	1. Mewujudkan kemampuan personil yg handal melalui peningkatan SDM dlm meningkatkan Yan Mas 2. Mewujudkan ekonomi peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana & prasarana perdagangan serta peningkatan sarana jalan Desa 3. Mewujudkan Tramtibmas melalui peningkatan koordinasi Dns/Ist. Kec. Babat 4. Mewujudkan tertib Adm. Pemrt. Pemb & Kemasy.	1. erwujudnya nya peningkatan SDM melalui Diklat secara bertahap 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masy. melalui penyediaan sarpras. Perdagangan. 3. erwujudnya peningkatan Yan Mas melalui peningkatan SDM & Sarpras. 4. Terwujudnya srn Perhubungan yg memadai melalui pemb. Jln poros desa 5. Peningk. koordinasi Dns/Ist. Melalui peningkatan In tensitas rpt koordinasi 6. Mewujudkan tertib adm melalui pemahaman tupoksi	1. Meningkatkan kualitas kelem bagan ketata lak sanaan perencanaan keuangan & umum	1. Penyusunan perencanaan adm data 2. Penetaan ketatalaksanaan dan rumah tangga 3. Penataan dan perencanaan kepegawaian 4. Perlengkapan dan kehumasan	1. Evaluasi & pelaporan serta pengkajian perenc. Bidang pemerintahan Pemb. & Kemasy 2. Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas 1. Evaluasi mekanisme surat menyurat. 2. Evaluasi mekanisme pelaporan. 1. Penataan dan pelaporan p[ersonil 2. Evaluasi dan peningkatan SDM 3. Mengikutsertakan 3 personil dlm diklat simduk 4. Mengikutsertakan 1 personil dalam diklat ketatalaksanaan 1. Evaluasi perlengkapan dan pendataan perlengkapan kantor 2. Rehab rumah dinas 3. Usulan 2 Perangkat komputer 4. Evaluasi dan pelaporan kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Bidang Pemerintahan.						1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel. 2. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemdes/ Kel. 4. Pembinaan Keagamaan dan Penda patan daerah 5. Pembinaan Perijinan dan pelayanan umum 6. Pembinaan politik Dalam Negeri.	1. Pembinaan dan ko-ordinasi dinas/Instansi. 2. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemdes/ Kel. 4. Pembinaan Keagamaan dan Penda patan daerah 5. Pembinaan Perijinan dan pelayanan umum 6. Pembinaan politik Dalam Negeri.	1. Penyusunan jadwal rapat dinas/instansi 2. Pembinaan, koordinasi, pelaporan pelaksanaan tugas 1. Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk 2. Evaluasi pelaporan pelaksanaan Simdu 3. Pendataan dan evaluasi jumlah penduduk dan hak pilih 1. Mendakan rapat dinas Kades/Ka – kel BPD dan Perangkat Desa. 2. Pembinaan pembuatan Perdes. 3. Pembinaan dan pelatihan APBD 4. Evaluasi dan penelitian usulan/lap Pemdes kpd Bupati 1. Inventarisasi TKD 2. Evaluasi dan Pelaporan PAD 2. Pendataan dan pengendalian tanah aset daerah 1. Pelayanan KTP, KSK dan Mutasi Penduduk 1. Inventarisasi keberadaan Partai Politik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bidang Ekonomi Pembangunan						1. Pengendalian dan koord ekonomi dan pemb.	1..Peningkatan Perekonomian pedesaan 2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil, dan menengah 3. Pembinaan Sektor pertanian peternakan dan perikanan 4. Pembinaan sektor pekerjaan umum.	1. Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa. 2. Pembinaan adm. Pengelola UED-SP 3. Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT 4. Evaluasi perkembangan Pasar Desa 1. Pembinaan dan penyuluhan kpd pengrajin industri kecil dan menengah. 1. Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi sarana produksi. 2. Pembinaan dan pengembangan usaha petani, panen, dan pemasaran 1. Pengkoordinasian usulan pemb fisik sarana dan prasarana unt. Diteruskan ke Bupati. 2. Pengawasan terhadap pengawasan an pengelolaan pemb. Fisik sarana dan prasarana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Bidang Kesejahteraan sosial						1. Peningkatan pengendalian kesejahteraan sosial	1. Pembinaan oleh raga pendidikan dan kebud. 2. Pembinaan sektor kesehatan. 3. Pembinaan dan koordinasi kesos	1. Pengkoordinasian perenc. Pelaks. Pengawasan dan usulan program pengemb. Bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Inventarisasi dan Pelaporan data pendidikan dan kebud. 1. Koord. Perenc, pelaks. Dan usulan program pembangunan bid kesehatan dan KB 2. Pelaks. Koord. Pengendalian dan pencegahan pe nyakit menular. 1. Pemberian reko mendasi ijin pengumpulan uang Baziz dan sumbangan 2. Pengkoordinasian kegiatan operasional kegiatan baziz. 3. Pengkoordinasian program pengentasan kemiskinan dan KB

[illegible]

Tahun : 2004 (PS3)

No	Bidang/Sektor/Sub Sektor	Kebijaksanaan Daerah Strategis	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan / Sasaran		
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Bidang Ketatausahaan	1. Tertib administrasi tausahaan 2. Tertib Adm Pem, Pemb, dan Kemas. 3. Pengendalian Ekonomi dan Pemb. 4. Koordinasi Kesejahteraan Sosial 5. Terkendali situasi Tramtib masy.	1. Terwujudnya masyarakat Babat yg sejahtera damai adil berakhlak mulia dan maju dalam perdagangannya	1. Pengembangan sektor perdagangan untuk peningkatan perekonomian masy. 2. Peningkatan koordinasi Dinas/Ist. & Kades/Kel dlm Pelak Tugas & Fungsi 3. Perwujudan tertib Adm. Pemerintahan, Pembangunan & kemasy 4. Perwujudan sarana & Prasarana perekonomian yang memadai 5. Terwujudnya kesejahteraan hidup & kedamaian 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat cepat tepat & bertanggung jawab	1. Mewujudkan kemampuan personil yg handal melalui peningkatan SDM dlm meningkatkan Yan Mas 2. Mewujudkan ekonomi peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana & prasarana perdagangan serta peningkatan sarana jalan Desa 3. Mewujudkan Tramtibmas melalui peningkatan koordinasi Dns/Ist. Kec. Babat 4. Mewujudkan tertib Adm. Pemrt. Pemb & Kemasy.	1. Terwujudnya peningkatan SDM melalui Diklat secara bertahap 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masy. melalui penyediaan sarpras. Perdagangan. 3. Terwujudnya peningkatan Yan Mas melalui peningkatan SDM & Sarpras. 4. Terwujudnya srn Perhubungan yg memadai melalui pemb. Jln poros desa 5. Peningkatan koordinasi Dns/Ist. Melalui peningkatan Intensitas rpt koordinasi 6. Mewujudkan tertib adm melalui pemahan tupoksi	1. Meningkatkan kualitas kelembagaan ketata laksanaan peencanaan keuangan & umum	1. Penyusunan perencanaan adm data 2. Penetapan ketatalaksanaan dan rumah tangga 3. Penataan dan perencanaan kepegawaian 4. Perlengkapan dan kehumasan	1. Evaluasi & pelaporan serta pengkajian perencanaan Bidang pemerintahan Pemb. & Kemasy 2. Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas 1. Evaluasi mekanisme surat menyurat. 2. Evaluasi mekanisme pelaporan. 1. Penataan dan pelaporan personil 2. Evaluasi dan peningkatan SDM 3. Mengikutsertakan personil dlm diklat 1. Evaluasi perlengkapan dan pendataan perlengkapan kantor 2. Usulan Penambahan Lokal Kantor 3. Evaluasi dan pelaporan kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Bidang Pemerintahan.						1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa/kel.	1. Pembinaan dan ko-ordinasi dinas/Instansi. 2. Pembinaan kedudukan dan catatan sipil. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemdes/ Kel. 4. Pembinaan Keagamaan dan Penda patan daerah 5. Pembinaan Perijinan dan pelayanan umum 6. Pembinaan politik Dalam Negeri.	1. Penyusunan jadwal rapat dinas/instansi 2. Pembinaan, ko ord, pelaporan pe laks tugas 1. Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk 2. Evaluasi pelaporan pelaks. Simdu 3. Pendataan dan evaluasi jumlah penduduk dan hak pilih 1. Mendakan rapat dinas Kades/Ka – kel BPD dan Perangkat Desa. 2. Pembinaan pembuatan Perdes. 3. Pembinaan dan pelatihan APBD 4. Evaluasi dan penelitian usulan/lap Pemdes kpd Bupati 1. Inventarisasi TKD 2. Evaluasi dan Pelaporan PAD 2. Pendataan dan pengendalian tanah aset daerah 1. Pelayanan KTP, KSK dan Mutasi Penduduk 1. Inventarisasi keberadaan Partai Politik

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bidang Ekonomi Pembangunan						1 Pengendalian dan koord ekonomi dan pemb.	1..Peningkat an Perekonomian pedesaan 2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah 3.Pembinaan Sektor pertanian peternakan dan perikanan 4.Pembinaan sektor pekerjaan umum.	1.Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa. 2.Pembinaan adm. Pengelola UED-SP 3.Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT 4. Evaluasi perkembangan Pasar Desa 1. Pembinaan dan penyuluhan kpd pengrajin industri kecil dan menengah. 1.Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi sarana produksi. 2.Pembinaan dan pengembangan usaha tani, panen, dan pemasaran 1.Pengkoordinasian usulan pemb fisik sarana dan prasarana unt. Diteruskan ke Bupati. 2. Pengawasan terhadap pengawasan pengelolaan pemb. Fisik sarana dan prasarana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Bidang Kesejahteraan sosial						1. Peningkatan pengendalian kesejahteraan sosial	1. Pembinaan oleh raga pendidikan dan kebud. 2. Pembinaan sektor kesehatan. 3. Pembinaan dan koordinasi kesos	1. Pengkoordinasian perenc. Pelaks. Pengawasan dan usulan program pengemb. Bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Inventarisasi dan Pelaporan data pendidikan dan kebud. 1. Koord. Perenc, pelaks. Dan usulan program pembabngunan bid kesehatan dan KB 2. Pelaks. Koord. Pengendalian dan pencegahan pe nyakit menular. 1 Pemberian reko mendasi ijin pengumpulan uang Baziz dan sumbangan 2. Pengkoordinasian kegiatan opera sional kegiatan baziz. 3. Pengkoordinasian program pengen tasan kemiskinan dan KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Bidang Tramtib						I. Peningkat an pengen- dalian dan koord. Bid tramtib.	I. Koord. Tramtib 2.Penegakan Perda dan Per UU 3. Penaggu langan ben- cana alam	I.Kerjasama dg apa rat keamanan da lam menjaga tram- tibtas 2. Pembinaan terha- dap kasi tremtib des/kel setiap bulan 3. Evaluasi dan monitoring serta pelaporan stiasi Tramtibas. 1. Evaluasi pelaks. IMB dan ijin HO 1.Koordinasi, dan antisipasi serta rehabilitasi benca- na alam 2. Pembinaan kesia- gaan perlindungan masyarakat.

Tahun : 2005 (PS4)

No	Bidang/Sektor/Sub Sektor	Kebijaksanaan Daerah Strategis	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan / Sasaran		
							Kebijakan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Bidang Ketatausahaan	1. Tertib administrasi tausahaan 2. Tertib Adm Pem, Pemb, dan Kemas. 3. Pengendalian Ekonomi dan Pemb. 4. Koordinasi Kesejahteraan Sosial 5. Terkendali situasi Tramtib masy.	1. Terwujudnya masyarakat Babat yg sejahtera damai adil berakhlak mulia dan maju dalam perdaganganannya	1. Pengembangan sektor perdagangan untuk peningkatan perekonomian masy. 2. Peningkatan koordinasi Dinas/Ist. & Kades/Kel dlm Pelak Tugas&Fungsi 3. Perwujudan tertib Adm. Pemeritahan, Pembangunan & kemasy 4. Perwujudan sarana & Pra sarana perekonomian yang memadai 5. Terwujudnya kesejahteraan hidup & kedamaian 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat cepat tepat & bertanggung jawab	1. Mewujudkan kemampuan personil yg handal melalui peningkatan SDM dlm meningkatkan Yan Mas 2. Mewujudkan ekonomi peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana & prasarana perdagangan serta peningkatan sarana jalan Desa 3. Mewujudkan Tramtibmas melalui peningkatan koordinasi Dns/Ist. Kec. Babat 4. Mewujudkan tertib Adm. Pemrt. Pemb & Kemasy.	1. Terwujudnya peningkatan SDM melalui Diklat secara bertahap 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masy. melalui penyediaan sarpras. Perdagangan. 3. Terwujudnya peningkatan Yan Mas melalui peningkatan SDM & Sarpras. 4. Terwujudnya srn Perhubungan yg memadai melalui pemb. Jln poros desa 5. Peningkatan koordinasi Dns/Ist. Melalui peningkatan. Intensitas rpt koordinasi 6. Mewujudkan tertib adm melalui pemahaman tupoksi	1. Meningkatkan kualitas kelemagaan ketatalaksanaan perencanaan keuangan & umum	1. Penyusunan perencanaan adm data 2. Penetapan ketatalaksanaan dan rumah tangga 3. Penataan dan perencanaan kepegawaian 4. Perlengkapan dan kehumasan	1. Evaluasi & pelaporan serta pengkajian perencanaan Bida ng pemerintahan Pemb. & Kemasy 2. Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas 1. Evaluasi mekanisme surat menyurat. 2. Evaluasi mekanisme pelaporan. 1. Penataan dan pelaporan p[ersonil 2. Evaluasi dan peningkatan SDM 3. Mengikutsertakan personil dlm diklat 1. Evaluasi perlengkapan dan pendataan perlengkapan kantor 2. Usulan Penambahan Lokal Kantor 3. Evaluasi dan pelaporan kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Bidang Pemerintahan.						1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sa/kel.	1. Pembinaan dan koordinasi di nas/Instansi. 2. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan des/ Kel. 4. Pembinaan Keagra rian dan Penda patan daerah 5. Pembinaan Perijinan dan pelayanan umum 6. Pembinaan politik Dalam Negeri.	1. Penyusunan jadwal rapat dinas/instansi 2. Pembinaan, ko ord, pelaporan pe laks. tugas 1. Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk 2. Evaluasi pelaporan pelaks. Simduk. 3. Pendataan dan evaluasi jumlah penduduk dan hak pilih 1. Mendakan rapat dinas Kades/Ka – kel BPD dan Pe-rangkat Desa. 2. Pembinaan pembuatan Perdes. 3. Pembinaan dan pelatihan APBD 4. Evaluasi dan peneltian usulan/lap Pemdes kpd Bupati 1. Inventarisasi TKD 2. Evaluasi dan Pelaporan PAD 3. Pendataan dan evaluasi t a nah aset daerah 1. Pelayanan KTP, KSK dan Mutasi Penduduk 1. Inventarisasi keberadaan Partai Politik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bidang Ekonomi Pembangunan						1. Pengendalian dan koord ekonomi dan pemb.	1..Peningkatan Perekonomian pedesaan 2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah 3.Pembinaan Sektor pertanian peternakan dan perikanan 4.Pembinaan sektor pekerjaan umum.	1.Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa. 2.Pembinaan adm. Pengelola UED-SP 3.Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT 4. Evaluasi perkembangan Pasar Desa 1. Pembinaan dan penyuluhan kpd pengrajin industri kecil dan menengah. 1.Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi sarana produksi. 2.Pembinaan dan pengembangan usaha tani, panen, dan pemasaran 1.Pengkoordinasian usulan pemb fisik sarana dan prasarana untuk diteruskan ke Bupati. 2. Pengawasan terhadap pengawasan pengelolaan pemb. Fisik sarana dan prasarana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Bidang Kesejahteraan sosial						1. Peningkatan pengendalian kesejahteraan sosial	1. Pembinaan oleh raga pendidikan dan kebud. 2. Pembinaan sektor kesehatan. 3. Pembinaan dan koordinasi kesos	1. Pengkoordinasian perencanaan. Pelaks. Pengawasan dan usulan program pengembangan. Bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Inventarisasi dan Pelaporan data pendidikan dan kebud. 1. Koord. Perenc, pelaks. Dan usulan program pembangunan bid kesehatan dan KB 2. Pelaks. Koord. Pengendalian dan pencegahan penyakit menular. 1. Pemberian rekomendasi pengumpulan uang Bazis dan sumbangan 2. Pengkoordinasian kegiatan operasional kegiatan bazis 3. Pengkoordinasian program pengentasan kemiskinan dan KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Bidang Tramtib						1. Peningkat an pengendalian dan koord. Bid tramtib.	1. Koord. Tramtib 2. Penegakan Perda dan Per UU 3. Penanggulangan bencana alam	1. Kerjasama dg apa rat keamanan da lam menjaga tram tibmas 2. Pembinaan terha dap kasi tramtib des/kel setiap bulan 3. Evaluasi dan monitoring serta pelaporan stasi Tramtibmas. 1. Evaluasi pelaks. IMB dan ijin HO 1. Koordinasi, dan antisipasi serta rehabilitasi benca na alam 2. Pembinaan kesia gaan perlindungan masyarakat.

Tahun : 2006 (PS5)

No	Bidang/Sektor/Sub Sektor	Kebijaksanaan Daerah Strategis	Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Cara Mencapai Tujuan / Sasaran		
							Kebijaksanaan	Program	Kegiatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1. Bidang Ketatausahaan	1. Tertib administrasi tausahaan 2. Tertib Adm Pem, Pemb, dan Kemas. 3. Pengendalian Ekonomi dan Pemb. 4. Koordinasi Kesejahteraan Sosial 5. Terkendali situasi Tramtib masy.	Terwujudnya masyarakat Babat yg sejahtera damai adil berakhlak mulia dan maju dalam perdagangannya	1. Pengembangan sektor perdagangan untuk peningkatan perekonomian masy. 2. Peningkatan koordinasi Dinas/Ist. & Kades/Kel dlm Pelak Tugas&Fungsi 3. Perwujudan tertib Adm. Pemerintahan, Pembangunan & kemasy 4. Perwujudan sarana & Prasarana perekonomian yang memadai 5. Terwujudnya kesejahteraan hidup & kedamaian 6. Terwujudnya pelayanan masyarakat cepat tepat & bertanggung jawab	1. Mewujudkan kemampuan personil yg handal melalui peningkatan SDM dlm meningkatkan Yan Mas 2. Mewujudkan ekonomi peningkatan ekonomi masyarakat melalui peningkatan sarana & prasarana perdagangan serta peningkatan sarana jalan Desa 3. Mewujudkan Tramtibmas melalui peningkatan koordinasi Dns/Ist. Kec. Babat 4. Mewujudkan tertib Adm. Pemrt. Pemb & Kemasy.	1. erwujudnya nya peningkatan SDM melalui Diklat secara bertahap 2. Terwujudnya peningkatan ekonomi masy. melalui penyediaan sarpras. Perdagangan. 3. erwujudnya peningkatan Yan Mas melalui peningkatan SDM & Sarpras. 4. Terwujudnya srn Perhubungan yg memadai melalui pemb. Jln poros desa 5. Peningk.koordinasi Dns/Ist. Melalui peningk. Intensitas rpt koordinasi 6. Mewujudkan tertib adm melalui pemahan tupoksi	1. Meningkatkan kualitas kelem bagan ketatalaksanaan perencanaan keuangan & umum	1. Penyusunan perencanaan adm data 3. Penetapan ketatalaksanaan dan rumah tangga 3. Penataan dan perencanaan kepegawaian 4. Perlengkapan dan kehumasan	1. Evaluasi & pelaporan serta pengkajian perencanaan Bidang pemerintahan Pemb. & Kemasy 2. Evaluasi dan pelaporan administrasi dan tata naskah dinas 1. Evaluasi mekanisme surat menyurat. 2. Evaluasi mekanisme pelaporan. 1. Penataan dan pelaporan p[ersonil 2. Evaluasi dan peningkatan SDM 3. Mengikutsertakan personil dlm diklat 1. Evaluasi perlengkapan dan pendataan perlengkapan kantor 2. Usulan Penambahan Lokal Kantor 3. Evaluasi dan pelaporan kehumasan

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	Bidang Pemerintahan.						1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa/kel.	1. Pembinaan dan koordinasi di nas/Instansi. 2. Pembinaan kependudukan dan catatan sipil. 3. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/ Kel. 4. Pembinaan Keagamaan dan Penda patan daerah 5. Pembinaan Perijinan dan pelayanan umum 6. Pembinaan politik Dalam Negeri.	1. Penyusunan jadwal rapat dinas/instansi 2. Pembinaan, ko ord, pelaporan pe laks. tugas 1. Evaluasi dan pelaporan mutasi penduduk 2. Evaluasi pelaporan pelaks. Simduk 3. Pendataan dan evaluasi jumlah penduduk dan hak pilih 1. Mendakan rapat dinas Kades/Ka – kel BPD dan Perangkat Desa. 2. Pembinaan pembuatan Perdes. 3. Pembinaan dan pelatihan APBD 4. Evaluasi dan penelitian usulan/lap Pemdes kpd Bupati 1. Inventarisasi TKD 2. Evaluasi dan Pelaporan PAD 3. Pendataan dan evaluasi tanah aset daerah 1. Pelayanan KTP, KSK dan Mutasi Penduduk 1. Pelaksanaan, Koordinasi dan fasilitasi serta pelaporan penyelenggaraan Pemilu 2. Inventarisasi keberadaan Partai Politik.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Bidang Ekonomi Pembangunan						1. Pengendalian dan koord ekonomi dan pemb.	1..Peningkat an Perekonomian pedesaan 2. Pembinaan dan penyuluhan pengrajin kecil dan menengah 3.Pembinaan Sektor pertanian peternakan dan perikanan 4.Pembinaan sektor pekerjaan umum.	1.Pembinaan dan evaluasi pengelola lumbung desa. 2.Pembinaan adm. Pengelola UED-SP 3.Pembinaan dan penyuluhan Pokmas IDT 4. Evaluasi perkembangan Pasar Desa 1. Pembinaan dan penyuluhan kpd pengrajin industri kecil dan menengah. 1.Pembinaan, pengendalian dan pengembangan produksi sarana produksi. 2.Pembinaan dan pengembangan usaha tani, panen, dan pemasaran 1.Pengkoordinasian usulan pemb fisik sarana dan prasarana unt. Diteruskan ke Bupati. 2. Pengawasan terhadap pengawasan pengelolaan pemb. Fisik sarana dan prasarana.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	Bidang Kesejahteraan sosial						1. Peningkatan pengendalian kesejahteraan sosial	1. Pembinaan oleh raga pendidikan dan kebud. 2. Pembinaan sektor kesehatan. 3. Pembinaan dan koordinasi kesos	1. Pengkoordinasian perenc. Pelaks. Pengawasan dan usulan program pengemb. Bidang pendidikan dan kebudayaan. 2. Inventarisasi dan Pelaporan data pendidikan dan kebud. 1. Koord. Perenc, pelaks. Dan usulan program pembabngunan bid kesehatan dan KB 2. Pelaks. Koord. Pengendalian dan pencegahan pe nyakit menular. 1 Pemberian reko mendasi ijin pengumpulan uang Baziz dan sumbangan 2. Pengkoordinasian kegiatan opera sional kegiatan baziz. 3. Pengkoordinasian program pengentasan kemiskinan dan KB

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Bidang Tramtib						1. Peningkat an pengen dalian dan koord. Bid tramtib.	1. Koord. Tramtib 2. Penegakan Perda dan Per UU 3. Penaggu langan ben cana alam	1. Kerjasama dg apa rat keamanan da lam menjaga tram tibmas 2. Pembinaan terha dap kasi tremtib des/kel setiap bulan 3. Evaluasi dan monitoring serta pelaporan stiasi Tramtibmas. 1. Evaluasi pelaks. IMB dan ijin HO 1. Koordinasi, dan antisipasi serta rehabilitasi benca na alam 2. Pembinaan kesia gaan perlindungan masyarakat.

ANALISA STRATEGIS PILIHAN (ANALISA SWOT)

Internal Eksternal	Kekuatan (Strength) - Berlakunya Perda No. 29 Tahun 2000, Kep. Bupati Nomor 7 Tahun 2001 dan Kep. Bupati Nomor 55 Tahun 2002 - Jumlah personil yang cukup - Sarana dan prasarana yang memadai	Kelemahan (Weakness) - Kualitas SDM kurang - Terbatasnya dana - Rendahnya disiplin karyawan
Peluang (Opportunities) - Merupakan sentra perdagangan - Letak yang strategis - Terbentuknya dinas/instansi	- Memantapkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan guna mengkoordinasikan dinas /instansi dan kedes/kelurahan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat - memberdayakan personil yang ada untuk memantapkan pelayanan masyarakat - Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada guna menunjang pengembangan Kecamatan Babat sebagai sentra perdagangan	- Meningkatkan kwalitas SDM pada kantor Kecamatan Babat untuk mendukung optimalisasi pengembangan potensi wilayah Kecamatan Babat - Meningkatkan kinerja apartur Kecamatan Babat dalam optimalisasi pemberian pelayanan pada masyarakat - Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Tantangan (Threat) - Ekonomi masyarakat renda - Sering Terjadi Bencana banjir - Lemahnya koordinasi antar dinas/instansi dan Kades/Kelurahan	- Optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babat dalam memantapkan koordinasi dinas/instansi dan Kades.Kelurahan guna meningkatkan perekonomian masyarakat - Meningkatkan kinerja personil Kecamatan Babat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menghadapi kondisi geografis yang rentang terhadap bencana alam - Mengoptimalkan personil yang ada dalam menginventarisir sarana dan prasarana perekonomian guna meningkatkan kualitas dan kwanritas prasarana perekonomian di Kecamatan Babat	- Meningkatkan kwalitas sumber daya manusia pada Kecamatan Babat dalam mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat guna meningkatkan ekonomi masyarakat - Meningkatkan disiplin karyawan dalam memantapkan koordinasi antar dinas/instansi dan Kade/Kelurahan untuk mengantisipasi bencana alam - Mengoptimalkan penggunaan dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.